

# Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises During the Covid-19 Pandemic in Sidoarjo

*by* Hendra Sukmana

---

**Submission date:** 28-Apr-2022 09:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1822873661

**File name:** Hendra\_Sukmana\_FIXX.pdf (386.22K)

**Word count:** 4333

**Character count:** 27632



## Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises During the Covid-19 Pandemic in Sidoarjo

### Implementasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 di Sidoarjo

Hendra Sukmana\*, Isnaini Rodiyah, Lailul Mursyidah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

#### ABSTRACT

MSMEs in Indonesia play a role as a trigger for economic growth in developing and developed countries. MSMEs also have a crucial function in overcoming problems in a region or region. When the economic situation slumps due to the Covid-19 Pandemic, business people must be really observant in making decisions. The Sidoarjo government has again taken steps as a form of controlling the economic sector during the pandemic. The purpose of this study is to identify the implementation of policies to strengthen micro, small and medium enterprises during the Covid-19 pandemic in Sidoarjo. The research method used is a literature review using 25 journal articles. The results of the study show there are several MSME protection schemes carried out by the government in Sidoarjo, namely as follows: First, there is financial assistance and social assistance for MSME actors affected by Covid-19, especially those who are vulnerable and classified as very poor. Second, tax incentives for MSMEs. Third, relaxation and restructuring of credit for MSMEs through the KurdaSayang program. Fourth, expansion of MSME working capital financing. Fifth, synergistic cooperation between local governments and related stakeholders as a buffer for MSME products. Sixth, training on the use of e-learning digital platforms. Meanwhile, the implementation of policies to strengthen micro, small and medium enterprises during the pandemic in Sidoarjo, can be seen from the communication, bureaucratic structure, resources and attitude of the implementers.

**Keywords:** Implementation of policies, MSMEs, Covid-19

#### ABSTRAK

UMKM di Indonesia berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan negara maju. UMKM juga memiliki fungsi krusial dalam mengatasi permasalahan di suatu wilayah atau daerah. Saat situasi ekonomi terpuruk akibat Pandemi Covid-19, para pelaku bisnis harus benar-benar memahami dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Sidoarjo kembali mengambil langkah sebagai bentuk pengendalian sektor ekonomi di masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah selama masa pandemi Covid-19 di Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan 25 artikel jurnal. Hasil kajian menunjukkan ada beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan oleh peme-

#### OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)  
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:  
Hasniati

Reviewed by:  
Ismi Dwi Astuti Nurhaeni and Tri  
Yuniningsih

\*Correspondence:

Hendra Sukmana  
[hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

Published: 29 April 2022

Citation:  
Sukmana, H., et.al (2021)  
Implementation of Micro, Small  
and Medium Enterprises During  
the Covid-19 Pandemic in  
Sidoarjo.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan  
Manajemen Publik), 10:1  
doi: 10.21070/jkmp.v10i1.1684

rintah di Sidoarjo, yaitu sebagai berikut: Pertama, adanya bantuan dana dan bansos bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19, khususnya yang rentan dan tergolong sangat miskin. Kedua, insentif pajak bagi UMKM. Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program KurdaSayang. Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Kelima, kerjasama sinergis antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait sebagai penyangga produk UMKM. Keenam, pelatihan penggunaan platform digital e-learning. Sementara itu, implementasi kebijakan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah pada masa pandemi di Sidoarjo, terlihat dari komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan sikap para pelaksana.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, UMKM, Covid-19

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu wabah yang menimbulkan keresahan paling ekstrim selama dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan implikasi yang ditimbulkan menyentuh seluruh elemen, baik ekonomi, sosial, dan politik, di seluruh dunia (Khanzad & Gooyabadi, 2021), termasuk di Indonesia. The World Trade Organisation (WTO) bahkan memprediksi tatanan negara masih akan belum stabil bahkan volume perdagangan dunia secara global akan mengalami penurunan sekitar 32% pada tahun 2021-2022. Terlebih, ancaman virus Corona kembali hadir dengan varian baru seperti Omicron, sehingga keseluruhan aktivitas masyarakat harus dibatasi sesuai dengan mandat WHO, WTO dan pemerintah negara (Arrizal & Sofyantoro, 2020). Indonesia sendiri mengalami perubahan drastis pada angka-angka di sektor pariwisata, perdagangan, kesehatan, bahkan sektor ekonomi makro maupun mikro, tidak terkecuali pada sektor ekonomi yang paling terpengaruh oleh COVID-19 adalah sektor rumah tangga (Sugiri, 2020).

Tidak ingin mengalami kerugian masif, pemerintah kemudian mengambil langkah dalam percepatan penanganan Covid-19, salah satunya menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan PSBB bertujuan agar masyarakat membatasi seluruh kegiatan di luar dan menekan angka penyebaran Covid-19 secara masif di Indonesia (Rosita & Freddy, 2022). Bahkan, pembatasan ini juga diterapkan bagi pelaksanaan pendidikan, kegiatan ekonomi maupun sektor lainnya yang mengundang kerumunan dan berbahaya bagi masyarakat. PSBB ini juga berlaku di wilayah Sidoarjo. Keterbatasan kegiatan masyarakat di Sidoarjo mempengaruhi perekonomian masyarakat. Padahal, Sidoarjo dikenal sebagai salah satu kota UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara maju. UMKM juga memiliki fungsi krusial dalam mengatasi pengangguran di suatu wilayah maupun daerah (Huurin'ien et al., 2021). Adanya UMKM memberi peluang lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat menjadi terjamin. Menyadari manfaat peran UMKM tersebut, sehingga muncul upaya pengembangan UMKM sebagai upaya dukungan terhadap percepatan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di daerah dan pusat serta dapat meningkatkan daya saing produk UMKM (Sunariani et al., 2017). Akan tetapi, selama Covid-19 ini, pelaku UMKM mengalami banyak kemunduran dan kerugian yang selanjutnyaberdampak pada kesejahteraannya, sehingga mulai bergantung pada bantuan-bantuan ekonomi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat maupun daerah (Muzdalifah et al., 2020).

Adapun dampak ekonomi dan perdagangan yang terlihat sendiri yaitu adanya penurunan angka daya beli, penjualan, omzet bahkan sampai dilakukan pengurangan karyawan. Kondisi ini memaksa pelaku UMKM untuk mengambil tindakan maupun langkah demi keberlangsungan usaha dan perekonomiannya sendiri. Oleh karena itu, banyaknya perubahan upaya UMKM dalam mempertahankan usahanya menjadi bagian akibat dari kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 (Muzdalifah et al., 2020).

Di saat situasi ekonomi terpuruk akibat Pandemi Covid-19, pelaku bisnis harus benar-benar jeli dalam mengambil keputusan. Pemerintah Sidoarjo kembali mengambil langkah sebagai bentuk pengendalian sektor ekonomi selama Pandemi, yaitu penguatan UMKM

dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada saat pandemi tidak sedikit UMKM yang mengalami krisis usaha. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Sidoarjo untuk menilik kembali implementasi kebijakan dalam penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi di Sidoarjo.

### 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 25 penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di masa pandemi Covid-19. Hasil temuan penelitian berupa rekomendasi yang akan di adopsi ataupun dilakukan oleh UMKM untuk bertahan pada masa pandemi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Masa Pandemi di Sidoarjo

Pandemi covid-19 menjadi wabah yang memberi dampak secara besar-besaran dan dinilai mempengaruhi keseluruhan aspek maupun sektor termasuk usaha kecil dan menengah (Xu & Abbasov, 2021). Namun, pada pandangan lain, adanya pandemi Covid-19, lebih menjadikan usaha kecil dan menengah memiliki pasar dan peluang baru (Belitski et al., 2021). Keberadaan UMKM sendiri disadari sebagai program yang sangat signifikan demi perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia (Pangesti, 2021). Penelitian Wijayaningsih, dkk (2021) menjelaskan bahwa UMKM harus diperhatikan kontribusinya dalam perkembangan ekonomi dan dijadikan sebagai salah satu tujuan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, Fildzah, dkk (2021) menambahkan bahwa UMKM menjadi sangat krusial dan diperlukan karena diyakini mampu menuntaskan permasalahan ekonomi mikro dan penurunan jumlah pengangguran di suatu wilayah.

UMKM selalu dipandang memiliki dan memberi kontribusi yang baik bagi seluruh masyarakat yang hendak memulai suatu usaha demi kelangsungan hidupnya, hal ini tentunya juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi maupun cara agar para pelaku usaha UMKM dapat terus mendukung perekonomian negara (Suryani, 2021). Pada masa pandemi Covid-19, seluruh sektor terganggu termasuk pada UMKM, dibutuhkan kebijakan publik yang sangat inovatif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama wabah ini (Rosita & Freddy, 2022). Seluruh hal yang menjadi kepentingan pemerintah yang terkait dengan masyarakat disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik membuka peluang bagi masyarakat untuk merasa dilindungi dan didukung dalam memenuhi hak serta kewajibannya sehingga masalah kebijakan dapat diatasi dan diselesaikan (Nafiah et al., 2021).

Penelitian (Sugiri, 2020) menunjukkan bahwa seluruh dunia mengalami dampak pandemi, dan hal ini juga terjadi di Indonesia, termasuk pada sektor UMKM. Dampak yang dapat dilihat yaitu kesulitan modal karena perputaran finansial yang tidak lancar, angka penjualan menurun, kesulitan bahan baku produk, serta masalah distribusi. Kendala UMKM lainnya, selama pandemi yaitu akibat dari pembatasan sosial skala besar demi pencegahan penyebaran Covid-19 secara masif, membuat pelaku usaha UMKM atau konvensional harus mampu melakukan adaptasi dari sistem permodalan, produksi, operasional, distribusi maupun penjualan. Hal ini juga didukung oleh kajian studi (Ausat & Suherlan, 2021) dimana pelaku bisnis atau UMKM harus berani berinovasi dari tingkat strategi promosi, penjualan, bahkan transaksi dengan menggunakan teknologi atau digital.

Hambatan ini, sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah berperan untuk menjaga UMKM demi kestabilan perekonomian di Indonesia di masa pandemi (Kornelius et al., 2020). Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah menjadi acuan untuk menjalani perubahan kondisi selama Pandemi, karena wabah Covid-19 dikategorikan sebagai wabah nasional, sehingga menjadi wewenang pemerintah dalam mengupayakan langkah-langkah strategis untuk menangani dampak akibat covid-19 tersebut, termasuk



mengenai UMKM di Sidoarjo. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah di Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adanya bantuan dana dan bantuan sosial bagi para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19, terutama yang rentan dan tergolong sangat miskin. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pada peraturan ini dijelaskan bahwa pemerintah memberi bantuan dana atau dalam bentuk uang bagi pelaku UMKM sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan dan diberikan secara langsung melalui rekening penerima BPUM (Lumempow et al., 2021).

Kedua, insentif pajak bagi UMKM. Insentif Pajak merupakan suatu pajak yang diambil dan berasal dari penghasilan atas usaha-usaha yang telah didaftarkan dan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Sidoarjo, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memperkirakan dan menghitung kebutuhan modal kerja darurat yang nantinya akan diberikan kepada para pelaku UMKM yang telah terdampak pandemi Covid-19, pemerintah juga berupaya memberikan pembebasan membayar pajak kepada para pelaku UMKM selama enam bulan. Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat daerah Sidoarjo yang gemilang). Program KURDA Sayang bisa diakses hanya melalui bank resmi Pemkab Sidoarjo, yaitu BPR Delta Artha. Adapun nilai bantuan atau pinjaman yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mulai dari 5 juta hingga 50 juta rupiah. Pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, disiapkan dana 3,36 Milyar untuk memulihkan UMKM tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Sinuraya (2021) yaitu pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang, dimana terkait dengan penerapan proses, dukungan UMKM terkait dengan pemodal, kredit dan pemanfaatan digital (Rivani et al., 2021). Strategi jangka panjang berkaitan dengan perubahan strategi bisnis dan pengenalan platform digital yang memadai serta pembiayaan pelatihan yang dibutuhkan selama Pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan kerjasama dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM (Sugiri, 2020).

Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah yang sangat besar. Pemerintah Sidoarjo harus melakukan pengukuran kebutuhan UMKM terkait dengan pemodal dan bekerjasama dengan seluruh pihak berwenang seperti koperasi-koperasi yang mampu memberi permodalan tersebut. Selanjutnya, pemodal juga dilakukan dari insentif Pajak PPh Final untuk UMKM (Huurin'iiin et al., 2021). Kelima, kerjasama yang sinergi antara pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait sebagai penyangga produk UMKM. Pihak-pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan seluruh kebijakan selama Pandemi Covid-19, termasuk penyangga produk, mempromosikan, melakukan langkah-langkah praktis dalam hal distribusi maupun penjualannya. Hal ini sesuai dengan kajian empiris lain yang dilakukan oleh Alfrian & Pitaloka (2020) yang menjelaskan bahwa sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Dimana terjadi penurunan pendapatan pada sisi penjualan, sehingga diperlukan bantuan *stakeholder* sebagai penyangga produk UMKM. Selanjutnya, Rivani, Muftiadi & Nirmalasari (2021) menunjukkan bahwa masyarakat selama Pandemi lebih fokus pada kebutuhan pokok, sehingga UMKM lain (non makanan) terkesan tidak dibutuhkan dan transaksi penjualan juga menurun drastis. Pemerintah maupun *stakeholder* dituntut untuk dapat membangkitkan keterpurukan ini, terlebih keterbatasan pengetahuan mengenai sistem penjualan pada masa ini, seperti penggunaan teknologi membuat masyarakat pelaku UMKM hanya mengandalkan pemerintah. Sejatinya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo sangat beragam, mulai dari minuman, makanan, kerajinan, sepatu, batik, tas, koper bahkan tekstil lainnya. Akan tetapi, selama pandemi penurunan penjualan, pembeli, distribusi yang terhambat, produksi dan operasional yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat (Widyaningtyas & Rahmawati, 2021).

Keenam, pelatihan penggunaan platform digital secara *e-learning* (Sugiri, 2020). Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkenadampak pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 (Tanaya & Ekyawan, 2020). Banyak masyarakat yang masih belum beralih menjadi wirausaha yang inovatif, sehingga tidak memberikan perubahan bagi usahanya maupun perkembangan ekonomi secara masif (Fildzah et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi baru untuk melakukan pemasaran pada usaha UMKM, terutama terkait dengan penggunaan teknologi agar lebih siap dan merespons terhadap ketidak pastian selama pandemi (Klein & Todesco, 2021). Hal ini juga selaras dengan dukungan Pemerintah Indonesia yang proaktif agar terhubung dengan platform digital, agar tetap bertahan selama pandemi (Purbasari et al., 2021).

Pada masalah digital, Pemerintah Sidoarjo juga bersama pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dan *stakeholder* lainnya, terus melakukan sosialisasi dalam penggunaan digital seperti media sosial untuk pemasaran dan bergabung dengan platform seperti Gojek maupun Grab. Untuk pelayanan perijinan, Pemerintah Sidoarjo juga mengoptimalkan program SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo), dimana untuk menghentikan penyebaran virus corona di Sidoarjo maka seluruh pelayanan perijinan beralih menggunakan SIPRAJA termasuk kaitannyadengan UMKM (Saputra & Widiyarta, 2021).

### Implementasi Kebijakan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Masa Pandemi di Sidoarjo

Model implementasi kebijakan yang dapat menggambarkan keseluruhan dari penguatan UMKM di Sidoarjo, yaitu dengan menggunakan teori George C. Edwards II yang disebut model kebijakan publik *Direct and Indirect on implementation*. Adapun empat variabel teori tersebut yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

#### a) Komunikasi

Peran aktif pemerintah dan setiap *stakeholder* dalam mewujudkan dan menerapkan kebijakan sangat dibutuhkan, begitu pula yang cobadilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Selama pandemi, komunikasi antar pihak mungkin akan sulit dilaksanakan karena pencegahan pertemuan secara langsung dan himbauan agar tidak melakukan kerumunan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih baik dalam merencanakan komunikasi antar pihak secara baik, sehingga dalam menjalankan program atau kebijakan, dapat dilakukan secara *continue* dan optimal (Sugiri, 2020). Peran aparatur di kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan RT atau RW terhadap kebijakan program yang sudah dirancang oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan sosialisasi melalui kerjasama dengan Kepolisian di masing-masing Kampung Tangguh Semeru melalui tokoh masyarakat setempat yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Sosialisasi juga dapat melalui platform digital (Nafiah et al., 2021), pesan berantai melalui WhatsApp, Telegram, maupun website terpercaya yang mudah diakses oleh seluruh pihak, baik *stakeholder* maupun masyarakat (Arrizal & Sofyantoro, 2020), terlebih oleh pelaku UMKM dan pelaksana penguatan UMKM di Sidoarjo.

#### b) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi kebijakan ini apabiladialalisis dengan seksama merupakan kebijakan dengan struktur birokrasi yang terfragmentasikan. Fragmentasi sendiri merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan sehingga memerlukan koordinasi dan manajemen risiko yang memadai pada implemmentasi kebijakan (Nafiah et al., 2021). Struktur birokrasi untuk pelaksanaan kebijakan penguatan sudah ada, namun perlu peningkatan dalam menjalankan fungsinya, terutamadalam hal memberikan informasi memadai dan mendukung seluruh kebutuhan pelaksanaan penguatan UMKM tersebut. Hal ini dapatdiwujudkan dengan adanya SOP yang tepat, regulasi yang mendukung UMKM selain mengenai bantuan dana maupun sosial, serta meminimalisir

kepentingan individu yang tidak sejalan dengan kebijakan penguatan UMKM yang diterapkan (Huurin'iin et al., 2021).

c) **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam implementasi. Sumber daya dalam penelitian ini terkait dengan seluruh sumber yang digunakan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan maupun program, baik berupa sumber daya manusia, data dan informasi penunjang serta fasilitas yang meliputi sarana prasarana dan dana (Huurin'iin et al., 2021). Oleh karena itu, setiap sumber daya harus terukur dan terencana secara detail. Hal ini dikarenakan seakuratnya sebuah komunikasi serta ketentuan yang jelas tidak akan dapat maksimal jika tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan dan mendukung kebijakan tersebut secara efektif. Sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UKM, baik secara kuantitas maupun secara kualitas telah memenuhi standar pelaksanaan program. Sumber daya dana/ anggaran, yang mana berkaitan dengan kecukupan anggaran bagi penguatan UMKM seperti dana gulir dari APBD sebesar 3,36 Miliar dan dana lainnya dari pajak yang dapat digunakan untuk memperlancar penguatan UMKM. Tentu, tanpadukungan anggaran yang memadai, kebijakan apapun tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

d) **Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program (Huurin'iin et al., 2021). Sikap pelaksana dalam kebijakan penguatan UMKM di Sidoarjo selama pandemi sudah selaras dan bersinergi satu sama lain. Terlebih, terdapat upaya percepatan penanganan Covid-19, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Komitmen seharusnya menjadi syarat utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Wujud nyata dari sikap, kepastian kinerja, dukungan seluruh pihak maupun *stakeholder* dapat dilihat dari komitmen tersebut, termasuk penguatan UMKM di Sidoarjo selama pandemi covid-19. Menurut kajian empiris (Khazad & Gooyabadi, 2021) pelaksanaan kebijakan akan berbanding lurus dengan sikap dari seluruh lingkungan atau organisasi. Sikap pelaksana program maupun kebijakan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Apabila pelaksana melaksanakan kebijakan dengan baik, maka tujuan kebijakan akan terwujud. Begitu juga sebaliknya, apabila sikap pelaksana tidak optimal maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai dengan baik.

Komitmen atau dukungan terhadap implementasi program ini sudah cukup baik, akan tetapi perlu pengaturan prioritas yang lebih baik, terkait dengan penguatan UMKM, seperti sosialisasi platform digital yang optimal, dukungan terhadap pendataan UMKM di seluruh Kabupaten Sidoarjo, serta sasaran kegiatan dari kebijakan penguatan UMKM. Program dan kegiatan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) harus secara terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

## KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir, telah berdampak bagi seluruh sektor termasuk perekonomian Indonesia, terutama bagi UMKM. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah di Sidoarjo, diantaranya: (1) Adanya bantuan dana dan bantuan sosial bagi para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19, terutama yang rentan dan tergolong sangat miskin; (2) Insentif pajak bagi UMKM; (3) Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat daerah Sidoarjo yang gemilang); (4) Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (5) Kerjasama yang sinergi antara pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait sebagai penyangga produk UMKM; (6) Pelatihan penggunaan platform digital secara *e-learning*.

Sementara, implementasi kebijakan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi di Sidoarjo, dapat dilihat dari komunikasi, yaitu perlu ditingkatkan dengan sosialisasi melalui kerjasama dengan Kepolisian di masing-masing Kampung Tangguh Semeru melalui tokoh masyarakat setempat yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Struktur birokrasi, yaitu struktur birokrasi untuk pelaksanaan kebijakan penguatan sudah ada, namun perlu peningkatan dalam menjalankan fungsinya. Sumber daya, dimana jumlah SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, baik secara kuantitas maupun secara kualitas telah memenuhi standar pelaksanaan program. Sumber daya dana/anggaran, yang mana berkaitan dengan kecukupan anggaran bagi penguatan UMKM seperti dana gulir dari APBD sebesar 3,36 Miliar dan dana lainnya dari pajak yang dapat digunakan untuk memperlancar penguatan UMKM. Selanjutnya, sikap pelaksana, dimana dalam kebijakan penguatan UMKM di Sidoarjo selama pandemi sudah selaras dan bersinergi satu sama lain.

## **1** **PENDANAAN**

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.



## REFERENCES

- Alfriani, G. R., & Pitaloka, E. (2020). Strategi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6. Series: Social and Humanities*, 6(2), 139–146.
- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi*. 2(1), 39–48.
- Ausat, A., & Suherlan. (2021). Obstacles and Solutions of MSMEs in Electronic Commerce during Covid-19 Pandemic: Evidence from Indonesia. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(1), 11–20.
- Belitski, M., Guenther, C., Kritikos, A. S., & Thurik, R. (2021). Economic effects of the COVID - 19 pandemic on entrepreneurship and small businesses. *Small Business Economics*, 593–609. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00544-y>
- Fildzah, L. A., Ardiningrum, R., & Muhammad, R. (2021). Pengaruh Industri Kecil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo (2010-2020). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Ampel*, 1(1), 59–67.
- Huurin'ain, A., Fistabella, S. J. A., Savira, A. N., & Wahyudi, K. E. (2021). Implementasi Insentif Pajak UMKM di Era Covid-19 di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicho*, 4(2), 520–535. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18097>
- Khanzad, Z. G., & Gooyabadi, A. A. (2021). Development of Strategic Resilience Framework for Small Businesses Post-COVID-19. *Business*, 1, 127–141.
- Klein, V. B., & Todesco, J. L. (2021). COVID-19 crisis and SMEs responses: The role of digital transformation. *Knowl Process Management*, 28(December 2020), 117–133. <https://doi.org/10.1002/kpm.1660>
- Kornelius, Y., Buntuang, P. C. D., & Bidin, C. R. K. (2020). Rethinking of Strategy Defending Small and Medium-Sized Enterprises ( SMEs ) During COVID-19 Pandemic. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*, 477, 786–790.
- Lumempow, K., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Muzdalifah, L., Novie, M., & Zaqiyah, S. (2020). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju UMKM Go-Digital di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Sidoarjo. *SENASIF 2020*, 2200–2208.
- Nafiah, B. A., Viola, B., Yanuardani, D. P., & Faisol, M. (2021). Implementasi Jawa Timur Belanja Online Sebagai Upaya Akibat Pandemi Covid-19. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 254–269.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 117–131.
- Purbasari, R., Muttaqin, Z., & Sari, D. S. (2021). Digital Entrepreneurship in Pandemic Covid 19 Era: The Digital Entrepreneurial Ecosystem Framework. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(Supplementary Issue1), 114–135.
- Rivani, R., Muftiadi, A., & Nirmalasari, H. (2021). Implementasi Program Digital Marketing Pada Pelaku Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 353–358.
- Rosita, I., & Freddy, H. T. R. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(3), 259–265.
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 194–211.
- Sinuraya, M. (2021). Implementasi Kebijakan Dalam Penyelamatan Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2020. *JOM FISIP*, 8, 1–11.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Sunariani, N. N., Suryadinatha, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui program Binaan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- Suryani, E. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Umkm (Studi Kasus: Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1591–1596.
- Tanaya, D. R., & Ekyawan, F. (2020). Empowerment Strategy on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) During COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Case Study of BRI Microfinance Center. *E3S Web of Conferences*, 202, 1–15.
- Widyaningtyas, I., & Rahmawati, F. (2021). Dampak Serta Strategi UMKM Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 21–41.
- Wijayaningsih, N. F., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2021). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman , Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah pada Masa Pandemi Co. *Jurnal Wacana Kinerja*, 24(2), 96–116. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.706>
- Xu, Q., & Abbasov, S. (2021). *Impact of Covid-19 Pandemic on Small and Medium-Sized Enterprises ( SMEs ) in Azerbaijan. February 2020*, 2759–2771. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.96153>

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Hendra Sukmana, Isnaini Rodyah, Lailul Mursyidah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

# Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises During the Covid-19 Pandemic in Sidoarjo

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[eprints.umsida.ac.id](http://eprints.umsida.ac.id)

Internet Source

4%

2

[jkmp.umsida.ac.id](http://jkmp.umsida.ac.id)

Internet Source

2%

3

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

2%

4

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On